

Reformasi Birukrasi



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

POHON KINERJA BERDASARKAN PENJENJANGAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2020-2024



CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF)

Ult. Outcome 1:
“Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola”

CSF 1:
“Terwujudnya kepuasan pimpinan
dan anggota DPR RI terhadap
layanan dukungan Sekretariat
Jenderal DPR RI”

CSF 2:
“Meningkatnya capaian RB Setjen
DPR RI”



MENGURAIKAN CSF KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KONDISI PALING OPERASIONAL

MENGURAIKAN CSF (1)

Ult. Outcome 1 :

“Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola”

CSF 1:

“Terwujudnya kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI”

Uraian CSF 1.1:

“Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI ”

Uraian CSF 1.1.1:

“Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Uraian CSF 1.1.1:

- Layanan kesekretariatan persidangan
- Layanan kesekretariatan pimpinan
- Layanan Kerjasama antar parlemen dan organisasi internasional
- Layanan pemberitaan parlemen

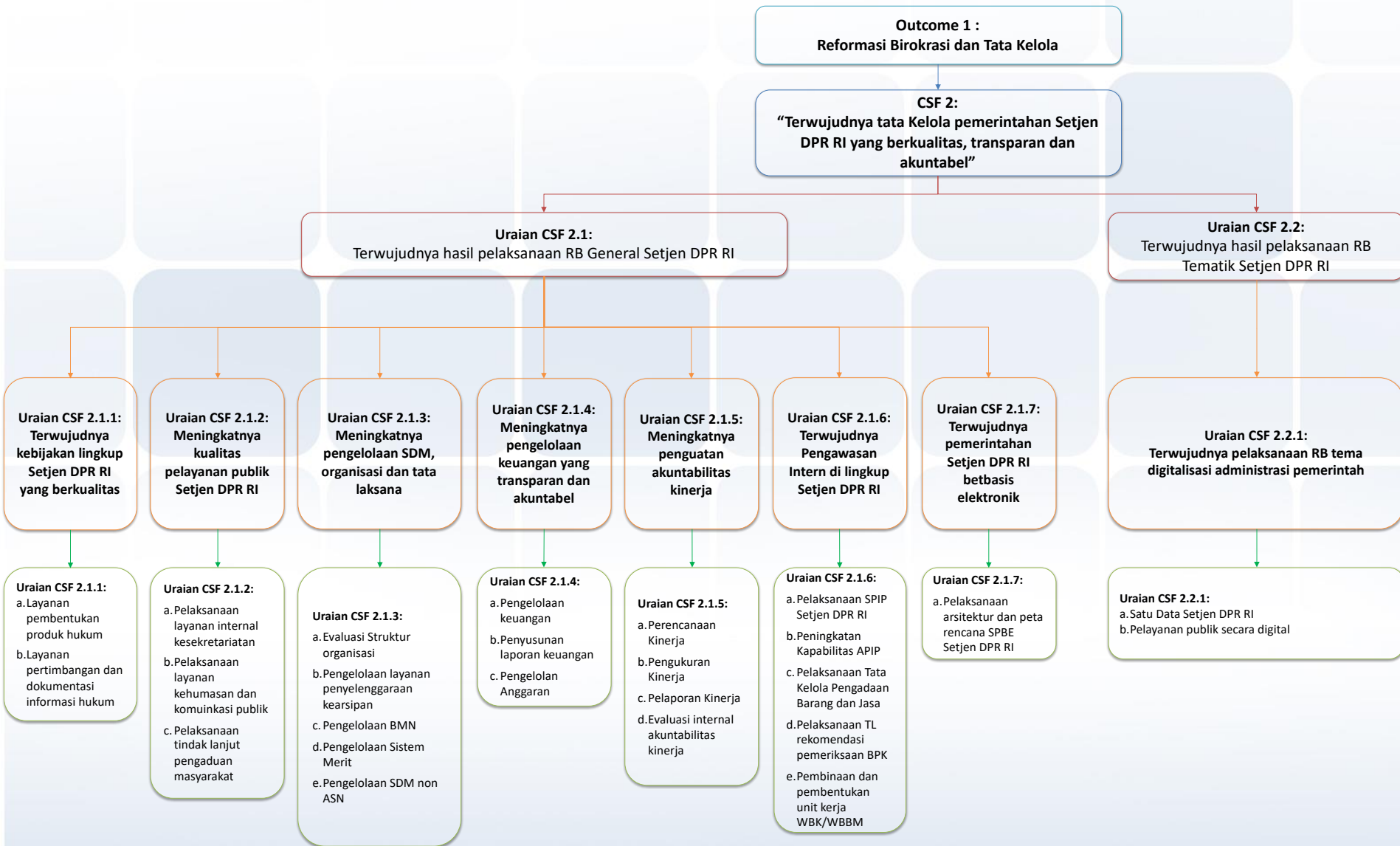
Uraian CSF 1.1.2:

“Optimalnya pemenuhan layanan dukungan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Uraian CSF 1.1.2:

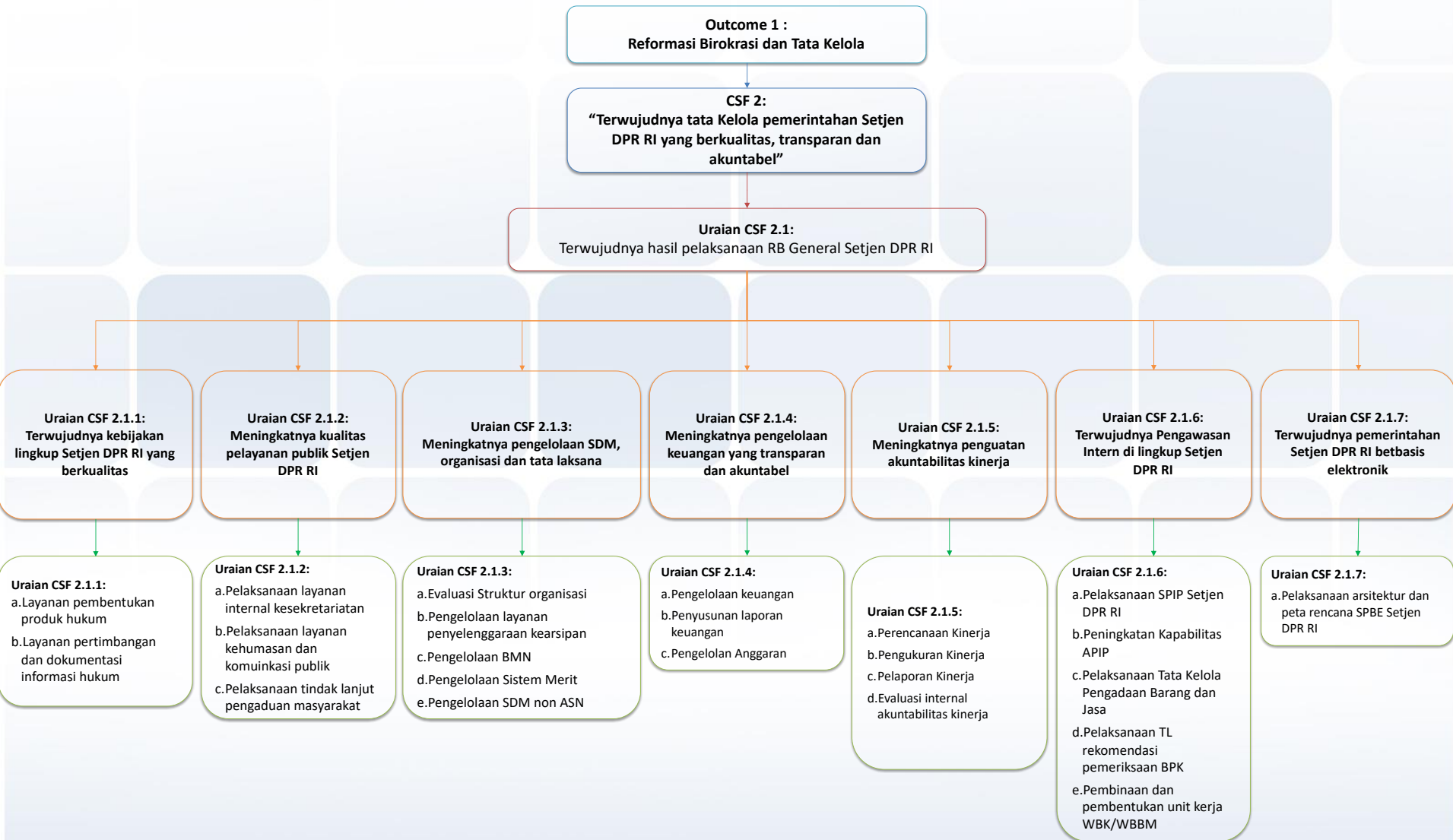
- Layanan dukungan perancangan peraturan perundang-undangan
- Layanan dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara
- Layanan dukungan keparlemenan
- Layanan dukungan pemantauan pelaksanaan UU

MENGURAIKAN CSF (2)



Detail uraian CSF untuk CSF 2 dapat dilihat pada slide berikutnya

MENGURAIKAN CSF – DETAIL CSF 2 (1)



MENGURAIKAN CSF – DETAIL CSF 2 (2)

Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

CSF 2:
“Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel”

Uraian CSF 2.2:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.2.1:
Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah

Uraian CSF 2.2.1:
a. Satu Data Setjen DPR RI
b. Pelayanan publik secara digital



MERUMUSKAN INDIKATOR KINERJA

MENYUSUN INDIKATOR (1)

Ult. Outcome 1 :
"Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola"

Indikator Kinerja:

- Persentase intansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
- Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

CSF 1:
"terwujudnya kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI"

Indikator Kinerja:

- Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Uraian CSF 1.1:
"Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI"

Indikator Kinerja:

- Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Indikator Kinerja:

- Persentase skenario, laporan singkat, laporan kesimpulan, risalah dan tindak lanjut hasil rapat persidangan yang dimanfaatkan oleh DPR RI (karena sesuai kebutuhan dan permintaan)
- Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan kegiatan Kerjasama internasional dan regional yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan
- Persentase dukungan kesekretariatan pimpinan, diplomasi parlemen, pemberitaan DPR RI, Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi
- Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
- Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Uraian CSF 1.1.1:
"Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan"

Uraian CSF 1.1.2:
"Optimalnya pemenuhan layanan dukungan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan"

Indikator Kinerja:

- Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI
- Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang diterima oleh DPR RI

Uraian CSF 1.1.1:
a. Layanan kesekretariatan persidangan
b. Layanan kesekretariatan pimpinan
c. Layanan Kerjasama antar parlemen dan organisasi internasional
d. Layanan pemberitaan parlemen

Uraian CSF 1.1.2:
a. Layanan dukungan perancangan peraturan perundang-undangan
b. Layanan dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara
c. Layanan dukungan keparlemenan
d. Layanan dukungan pemantauan pelaksanaan UU

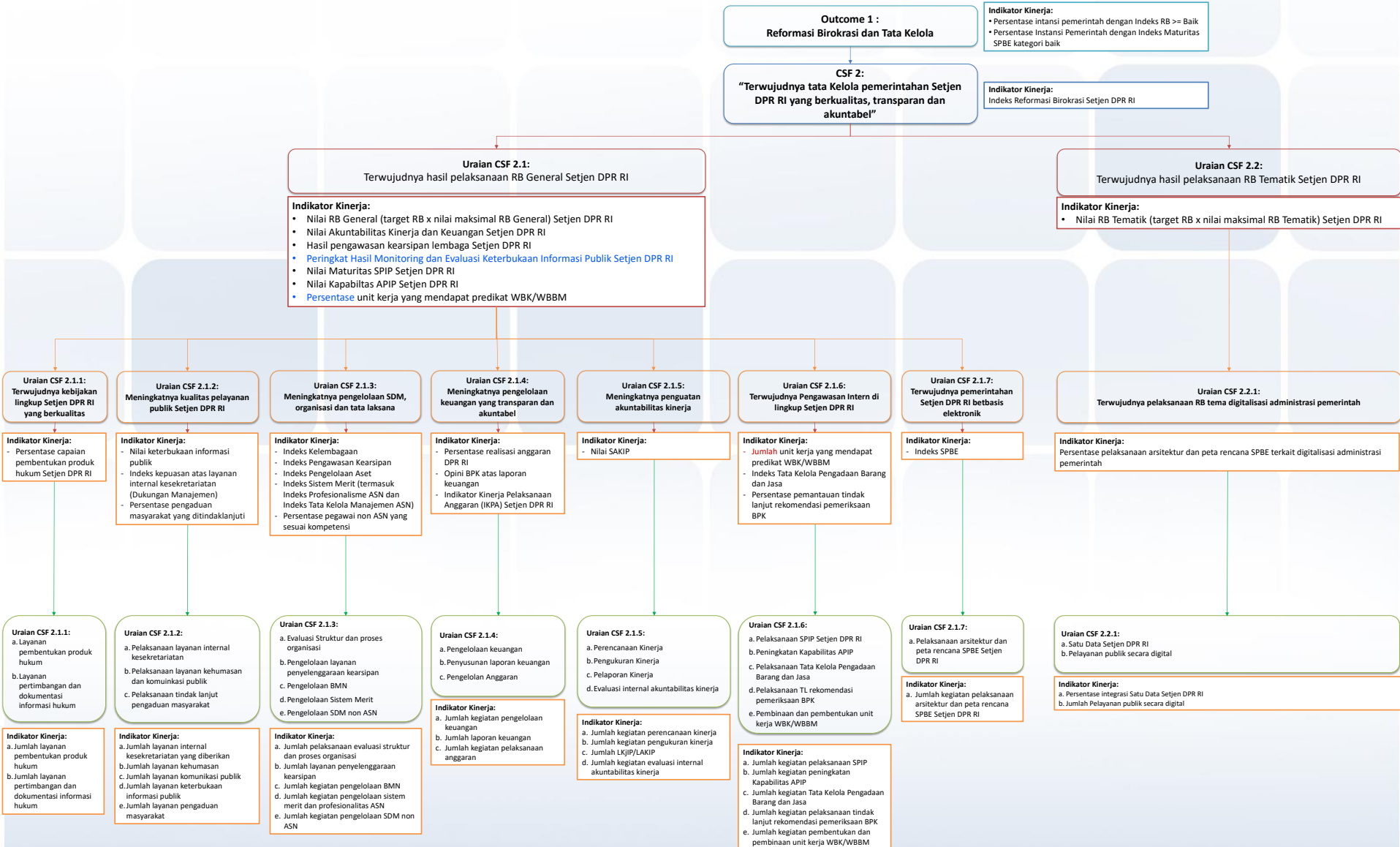
Indikator Kinerja:

- a. Jumlah layanan kesekretariatan persidangan
- b. Jumlah layanan kesekretariatan pimpinan
- c. Jumlah layanan Kerjasama antar parlemen dan organisasi internasional
- d. Jumlah layanan pemberitaan parlemen

Indikator Kinerja:

- a. Jumlah layanan dukungan perancangan peraturan perundang-undangan
- b. Jumlah layanan dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara
- c. Jumlah layanan dukungan keparlemenan
- d. Jumlah layanan dukungan pemantauan pelaksanaan UU

MENYUSUN INDIKATOR (2)



Detail pohon kinerja untuk CSF 2 dapat dilihat pada slide berikutnya

MENYUSUN INDIKATOR – DETAIL CSF 2 (1)

Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Indikator Kinerja:
• Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
• Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

CSF 2:
"Terwujudnya tata kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel!"

Indikator Kinerja:
Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.1:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB General Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:

- Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI
- Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Setjen DPR RI
- Hasil pengawasan kearsipan lembaga Setjen DPR RI
- **Peringkat Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Setjen DPR RI**
- Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI
- Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI
- **Persentase** unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Uraian CSF 2.1.1:
Terwujudnya kebijakan lingkup Setjen DPR RI yang berkualitas

Indikator Kinerja:

- Persentase capaian pembentukan produk hukum Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.1.1:

- Layanan pembentukan produk hukum
- Layanan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum

Indikator Kinerja:

- Jumlah layanan pembentukan produk hukum
- Jumlah layanan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum

Uraian CSF 2.1.2:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:

- Nilai keterbukaan informasi publik
- Indeks kepuasan atas layanan internal kesekretariatan (Dukungan Manajemen)
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Uraian CSF 2.1.2:

- Pelaksanaan layanan internal kesekretariatan
- Pelaksanaan layanan kehumasan dan komunikasi publik
- Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Indikator Kinerja:

- Jumlah layanan internal kesekretariatan yang diberikan
- Jumlah layanan kehumasan
- Jumlah layanan komunikasi publik
- Jumlah layanan keterbukaan informasi publik
- Jumlah layanan pengaduan masyarakat

Uraian CSF 2.1.3:
Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tata laksana

Indikator Kinerja:

- Indeks Kelembagaan
- Indeks Pengawasan Kearsipan
- Indeks Pengelolaan Aset
- Indeks Sistem Merit (termasuk Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN)
- Persentase pegawai non ASN yang sesuai kompetensi

Uraian CSF 2.1.3:

- Evaluasi Struktur dan proses organisasi
- Pengelolaan layanan penyelenggaraan kearsipan
- Pengelolaan BMN
- Pengelolaan Sistem Merit
- Pengelolaan SDM non ASN

Indikator Kinerja:

- Jumlah pelaksanaan evaluasi struktur dan proses organisasi
- Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan
- Jumlah kegiatan pengelolaan BMN
- Jumlah kegiatan pengelolaan sistem merit dan profesionalitas ASN
- Jumlah kegiatan pengelolaan SDM non ASN

Uraian CSF 2.1.4:
Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja:

- Persentase realisasi anggaran DPR RI
- Opini BPK atas laporan keuangan
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.1.4:

- Pengelolaan keuangan
- Penyusunan laporan keuangan
- Pengelolaan Anggaran

Indikator Kinerja:

- Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan
- Jumlah laporan keuangan
- Jumlah kegiatan pelaksanaan anggaran

Uraian CSF 2.1.5:
Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja:

- Nilai SAKIP

Uraian CSF 2.1.5:

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi internal akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja:

- Jumlah kegiatan perencanaan kinerja
- Jumlah kegiatan pengukuran kinerja
- Jumlah LKJIP/LAKIP
- Jumlah kegiatan evaluasi internal akuntabilitas kinerja

Uraian CSF 2.1.6:
Terwujudnya Pengawasan Intern di lingkup Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:

- Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK

Uraian CSF 2.1.6:

- Pelaksanaan SPIP Setjen DPR RI
- Peningkatan Kapabilitas APIP
- Pelaksanaan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelaksanaan TL rekomendasi pemeriksaan BPK
- Pembinaan dan pembentukan unit kerja WBK/WBBM

Indikator Kinerja:

- Jumlah kegiatan pelaksanaan SPIP
- Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP
- Jumlah kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- Jumlah kegiatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK
- Jumlah kegiatan pembentukan dan pembinaan unit kerja WBK/WBBM

Uraian CSF 2.1.7:
Terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI berbasis elektronik

Indikator Kinerja:

- Indeks SPBE

Uraian CSF 2.1.7:

- Pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:

- Jumlah kegiatan pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE Setjen DPR RI

MENYUSUN INDIKATOR – DETAIL CSF 2 (2)

Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Indikator Kinerja:

- Persentase intansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
- Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

CSF 2:
“Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel”

Indikator Kinerja:

Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.2:

Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:

- Nilai RB Tematik (target RB x nilai maksimal RB Tematik) Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.2.1:

Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah

Indikator Kinerja:

Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah

Uraian CSF 2.2.1:

- a. Satu Data Setjen DPR RI
- b. Pelayanan publik secara digital

Indikator Kinerja:

- a. Persentase integrasi Satu Data Setjen DPR RI
- b. Jumlah Pelayanan publik secara digital

PENYUSUNAN POHON KINERJA (1)

Ult. Outcome 1 :
"Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola"

Indikator Kinerja:

- Persentase intansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
- Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

CSF 1:

"Terwujudnya kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI"

Indikator Kinerja:

- Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Uraian CSF 1.1:

"Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI"

Indikator Kinerja:

- Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Indikator Kinerja:

- Persentase skenario, laporan singkat, laporan kesimpulan, risalah dan tindak lanjut hasil rapat persidangan yang dimanfaatkan oleh DPR RI (karena sesuai kebutuhan dan permintaan)
- Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan kegiatan Kerjasama internasional dan regional yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan
- Persentase dukungan kesekretariatan pimpinan, diplomasi parlemen, pemberitaan DPR RI, Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi
- Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
- Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Uraian CSF 1.1.1:
"Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan"

Uraian CSF 1.1.2:
"Optimalnya pemenuhan layanan dukungan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan"

Indikator Kinerja:

- Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI
- Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang diterima oleh DPR RI

Uraian CSF 1.1.1:

- a. Layanan kesekretariatan persidangan
- b. Layanan kesekretariatan pimpinan
- c. Layanan Kerjasama antar parlemen dan organisasi internasional
- d. Layanan pemberitaan parlemen

Indikator Kinerja:

- a. Jumlah layanan kesekretariatan persidangan
- b. Jumlah layanan kesekretariatan pimpinan
- c. Jumlah layanan Kerjasama antar parlemen dan organisasi internasional
- d. Jumlah layanan pemberitaan parlemen

Uraian CSF 1.1.2:

- a. Layanan dukungan perancangan peraturan perundang-undangan
- b. Layanan dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara
- c. Layanan dukungan keparlemenan
- d. Layanan dukungan pemantauan pelaksanaan UU

Indikator Kinerja:

- a. Jumlah layanan dukungan perancangan peraturan perundang-undangan
- b. Jumlah layanan dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara
- c. Jumlah layanan dukungan keparlemenan
- d. Jumlah layanan dukungan pemantauan pelaksanaan UU

PENYUSUNAN POHON KINERJA (2)

Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Indikator Kinerja:
• Persentase intansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
• Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

CSF 2:
"Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel"

Indikator Kinerja:
Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.1:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB General Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:
• Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI
• Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Setjen DPR RI
• Hasil pengawasan kearsipan lembaga Setjen DPR RI
• **Peringkat Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Setjen DPR RI**
• Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI
• Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI
• **Persentase** unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Uraian CSF 2.2:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:
• Nilai RB Tematik (target RB x nilai maksimal RB Tematik) Setjen DPR RI

Kinerja Strategis Sub

Kinerja Strategis Sub

Kinerja Operasional

Uraian CSF 2.1.1:
Terwujudnya kebijakan lingkup Setjen DPR RI yang berkualitas

Indikator Kinerja:
• Persentase capaian pembentukan produk hukum Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.1.1:
a. Layanan pembentukan produk hukum
b. Layanan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum

Indikator Kinerja:
a. Jumlah layanan pembentukan produk hukum
b. Jumlah layanan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum

Uraian CSF 2.1.2:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:
- Nilai keterbukaan informasi publik
- Indeks kepuasan atas layanan internal kesekretariatan (Dukungan Manajemen)
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Uraian CSF 2.1.2:
a. Pelaksanaan layanan internal kesekretariatan
b. Pelaksanaan layanan kehumasan dan komunikasi publik
c. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Indikator Kinerja:
a. Jumlah layanan internal kesekretariatan yang diberikan
b. Jumlah layanan kehumasan dan komunikasi publik
d. Jumlah layanan keterbukaan informasi publik
e. Jumlah layanan pengaduan masyarakat

Uraian CSF 2.1.3:
Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tata laksana

Indikator Kinerja:
- Indeks Kelembagaan
- Indeks Pengawasan Kearsipan
- Indeks Pengelolaan Aset
- Indeks Sistem Merit (termasuk Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN)
- Persentase pegawai non ASN yang sesuai kompetensi

Uraian CSF 2.1.3:
a. Evaluasi Struktur dan proses organisasi
b. Pengelolaan layanan penyelenggaraan kearsipan
c. Pengelolaan BMN
d. Pengelolaan Sistem Merit
e. Pengelolaan SDM non ASN

Indikator Kinerja:
a. Jumlah pelaksanaan evaluasi struktur dan proses organisasi
b. Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan
c. Jumlah kegiatan pengelolaan BMN
d. Jumlah kegiatan pengelolaan sistem merit dan profesionalitas ASN
e. Jumlah kegiatan pengelolaan SDM non ASN

Uraian CSF 2.1.4:
Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja:
- Persentase realisasi anggaran DPR RI
- Opini BPK atas laporan keuangan
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.1.4:
a. Evaluasi keuangan
b. Penyusunan laporan keuangan
c. Pengelolaan Anggaran

Indikator Kinerja:
a. Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan
b. Jumlah laporan keuangan
c. Jumlah kegiatan pelaksanaan anggaran

Uraian CSF 2.1.5:
Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja:
- Nilai SAKIP

Uraian CSF 2.1.5:
a. Perencanaan Kinerja
b. Pengukuran Kinerja
c. Pelaporan Kinerja
d. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja:
a. Jumlah kegiatan perencanaan kinerja
b. Jumlah kegiatan pengukuran kinerja
c. Jumlah kegiatan evaluasi internal akuntabilitas kinerja

Uraian CSF 2.1.6:
Terwujudnya Pengawasan Intern di lingkup Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:
- Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK

Uraian CSF 2.1.6:
a. Pelaksanaan SPIP Setjen DPR RI
b. Peningkatan Kapabilitas APIP
c. Pelaksanaan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
d. Pelaksanaan TL rekomendasi pemeriksaan BPK
e. Pembinaan dan pembentukan unit kerja WBK/WBBM

Indikator Kinerja:
a. Jumlah kegiatan pelaksanaan SPIP
b. Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP
c. Jumlah kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
d. Jumlah kegiatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK
e. Jumlah kegiatan pembentukan dan pembinaan unit kerja WBK/WBBM

Uraian CSF 2.1.7:
Terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI berbasis elektronik

Indikator Kinerja:
- Indeks SPBE

Uraian CSF 2.1.7:
a. Pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:
a. Jumlah kegiatan pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.2.1:
Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah

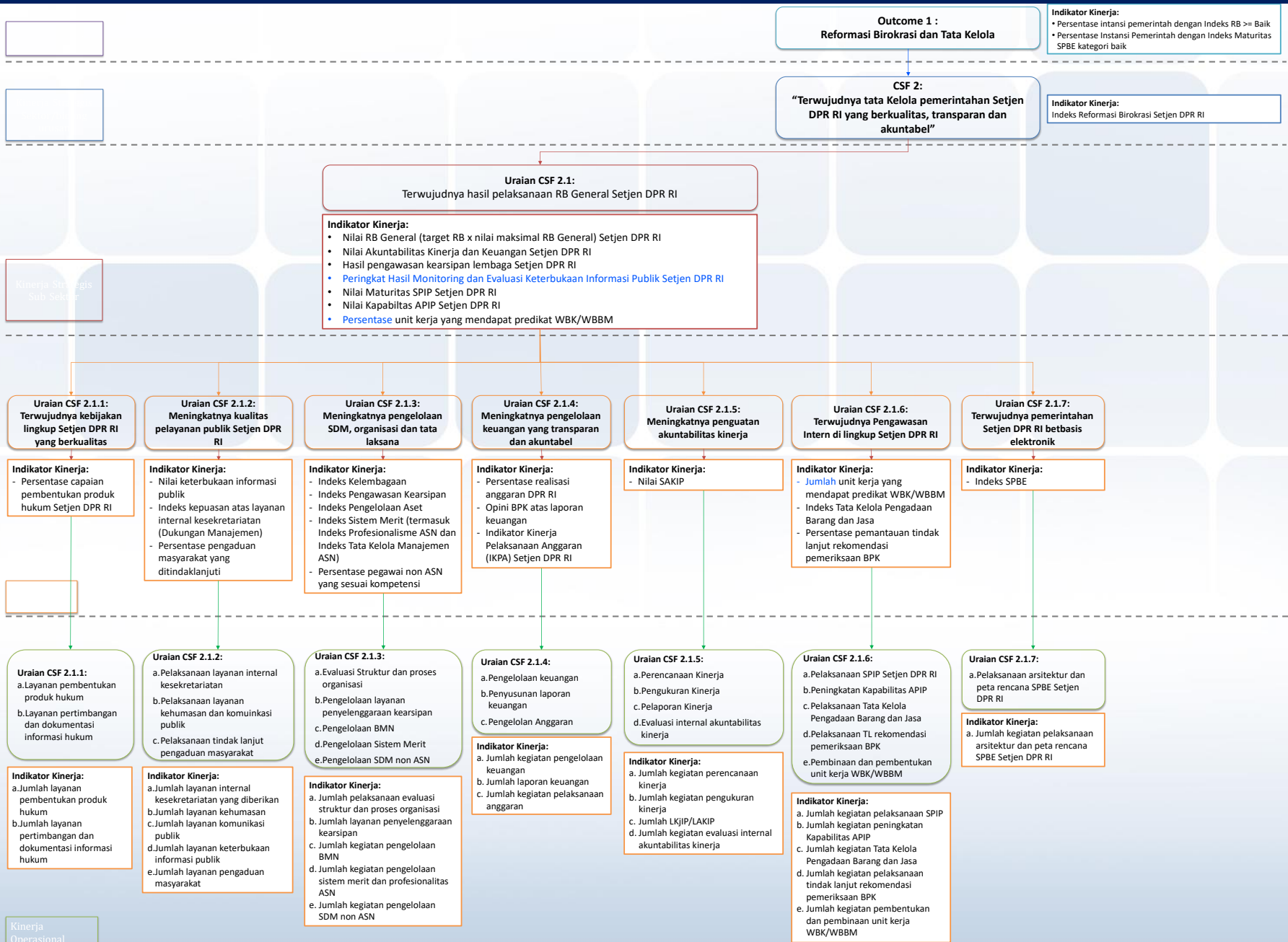
Indikator Kinerja:
Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah

Uraian CSF 2.2.1:
a. Satu Data Setjen DPR RI
b. Pelayanan publik secara digital

Indikator Kinerja:
a. Persentase Integrasi Satu Data Setjen DPR RI
b. Jumlah Pelayanan publik secara digital

Detail pohon kinerja untuk CSF 2 dapat dilihat pada slide berikutnya

PENYUSUNAN POHON KINERJA (3)



PENYUSUNAN POHON KINERJA (4)

Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Indikator Kinerja:

- Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
- Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

CSF 2:

“Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel”

Indikator Kinerja:

Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Kinerja Strategis Sektor/Bidang Urusan

Uraian CSF 2.2:

Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:

Nilai RB Tematik (target RB x nilai maksimal RB Tematik) Setjen DPR RI

Kinerja Strategis Sub Sektor

Uraian CSF 2.2.1:

Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah

Indikator Kinerja:

Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah

Uraian CSF 2.2.1:

- a. Satu Data Setjen DPR RI
- b. Pelayanan publik secara digital

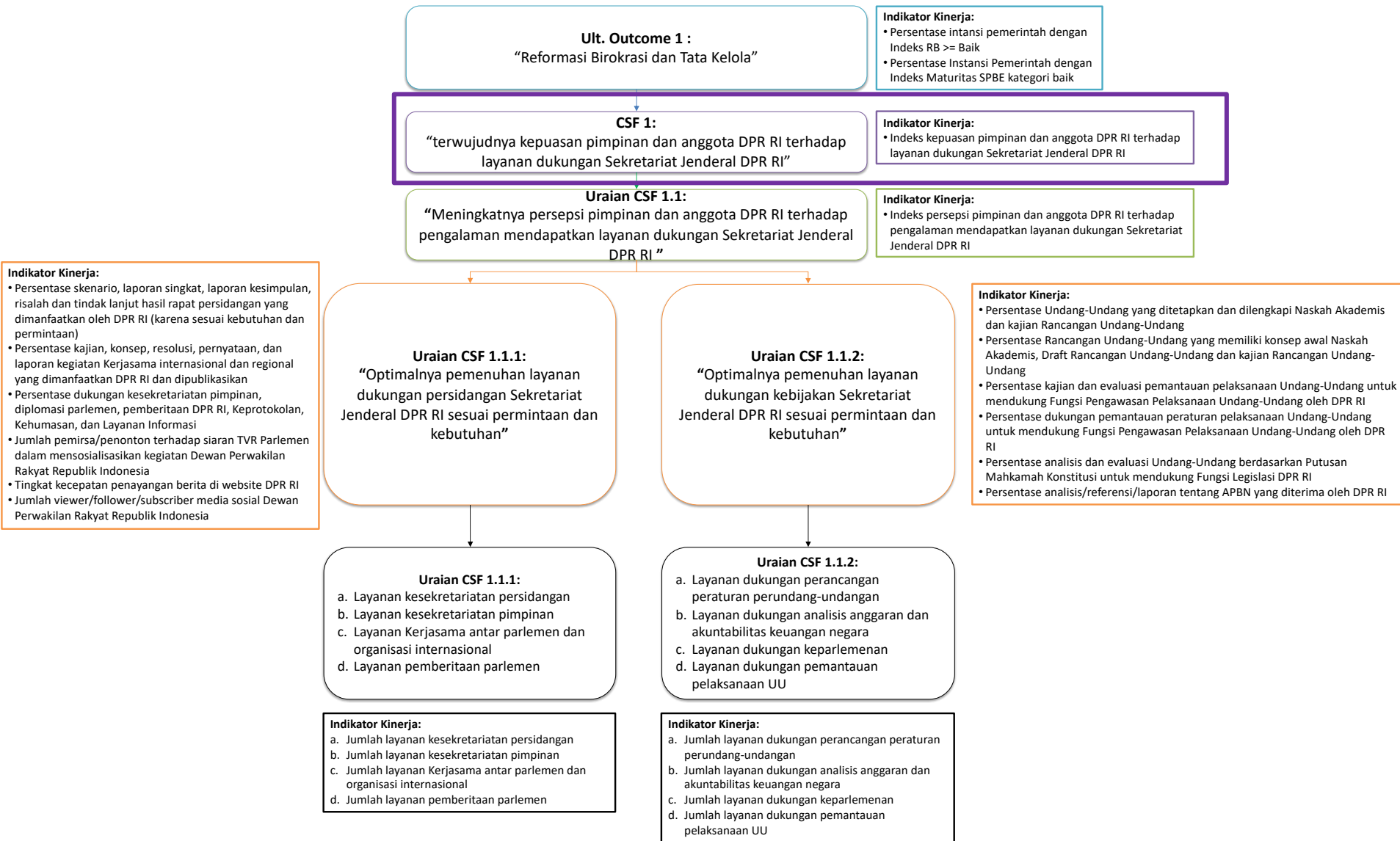
Indikator Kinerja:

- a. Persentase integrasi Satu Data Setjen DPR RI
- b. Jumlah Pelayanan publik secara digital

Kinerja Operasional



MENERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN



MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (2)

CSF 1:

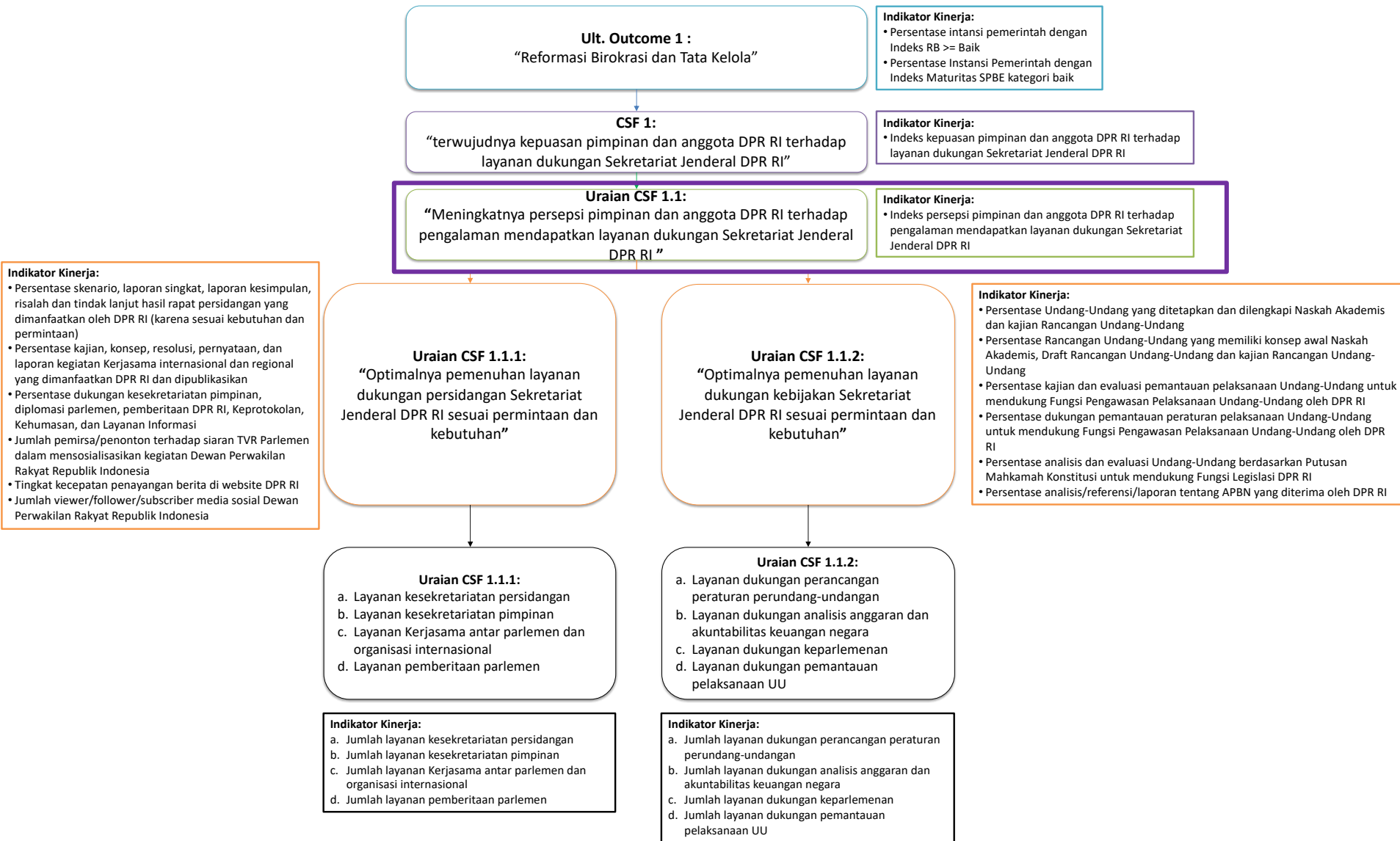
“Terwujudnya kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI”

Indikator Kinerja:

- Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SS.1 Terwujudnya kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	IKSS 1.1 Indeks kepuasan pimpinan dan Anggota DPR RI atas Layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekjen	3,32	?



MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (3)

Uraian CSF 1.1:

“Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI ”

Indikator Kinerja:

Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SP.1 Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Deputi Persidangan	<p>IKP 1.1 Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Persidangan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indeks ini bisa dihitung dengan menambahkan 1 pertanyaan “Secara umum, bagaimana pengalaman anda mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Persidangan”; atau• Mengukur nilai (score) rata-rata dari 7 (tujuh) parameter terkait layanan persidangan → sama dengan kondisi saat ini, namun berbeda bahasa indikator	Deputi Bidang Persidangan	3,32	?

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (4)

Uraian CSF 1.1:

“Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI ”

Indikator Kinerja:

Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
2	SP.1 Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Administrasi	<p>IKP 1.1 Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Administrasi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ini bisa dihitung dengan menambahkan 1 pertanyaan “Secara umum, bagaimana pengalaman anda mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Administrasi”; atau • Mengukur nilai (score) rata-rata dari 7 (tujuh) parameter terkait layanan Administrasi → sama dengan kondisi saat ini, namun berbeda bahasa indikator 	Deputi Bidang Adminiistrasi	3,32	?

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (5)

Uraian CSF 1.1:

“Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI ”

Indikator Kinerja:

Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
3	SP.1 Meningkatkan persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Badan Keahlian	<p>IKP 1.1 Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Badan Keahlian</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ini bisa dihitung dengan menambahkan 1 pertanyaan “Secara umum, bagaimana pengalaman anda mendapatkan layanan dukungan Badan Keahlian”; atau • Mengukur nilai (score) rata-rata dari 7 (tujuh) parameter terkait layanan Badan Keahlian → sama dengan kondisi saat ini, namun berbeda bahasa indikator 	Badan Keahlian	3,32	?

**Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

- Indikator Kinerja:**
- Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

**CSF 2:
"Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel"**

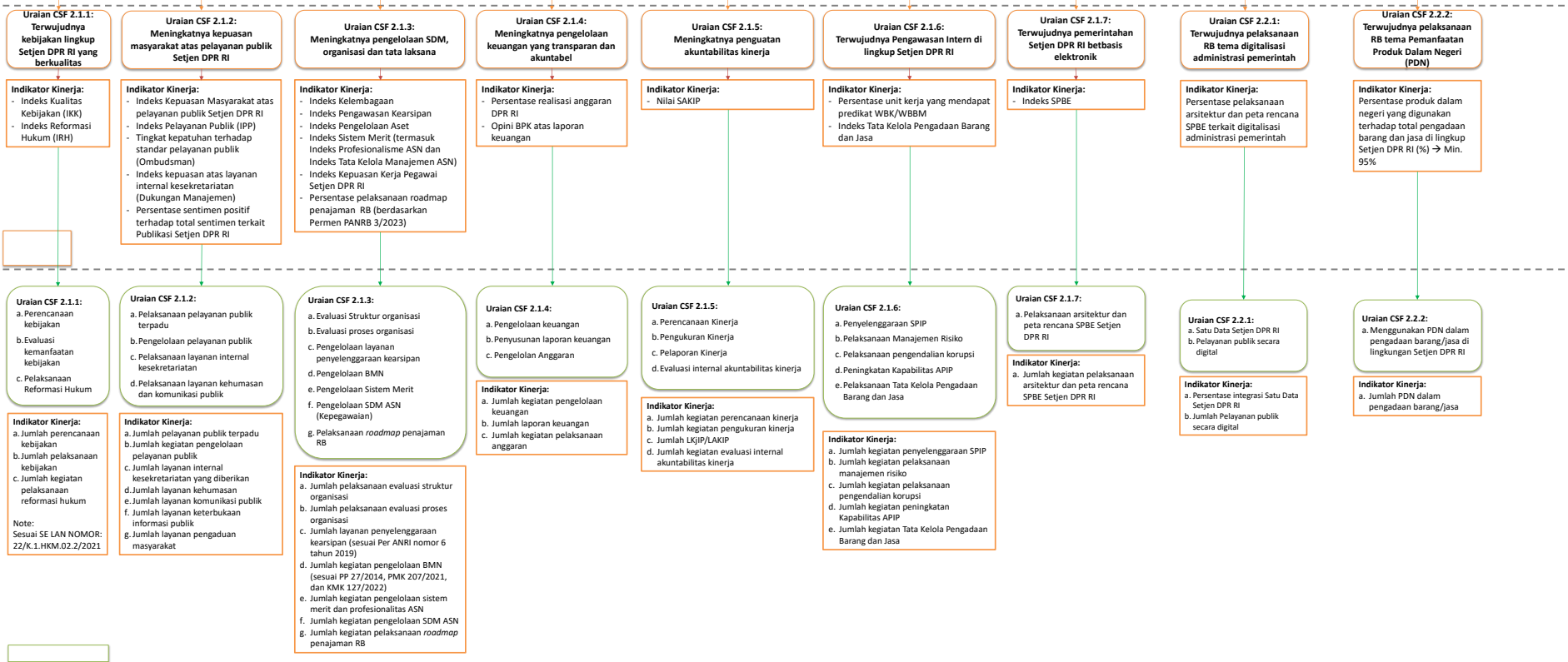
- Indikator Kinerja:**
- Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

**Uraian CSF 2.1:
Meningkatnya capaian kriteria pengungkit RB Setjen DPR RI atau Terwujudnya hasil pelaksanaan RB General Setjen DPR RI**

- Indikator Kinerja:**
- Nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPR RI, atau
 - Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI

**Uraian CSF 2.2:
Meningkatnya capaian kriteria hasil RB Setjen DPR RI atau Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI**

- Indikator Kinerja:**
- Nilai kriteria hasil RB Setjen DPR RI, atau
 - Nilai RB Tematik (target RB x nilai maksimal RB Tematik) Setjen DPR RI



MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (6)

CSF 2:

“Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel”

Indikator Kinerja:

Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SS.2 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI	Sekjen	80 (A)	?

Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

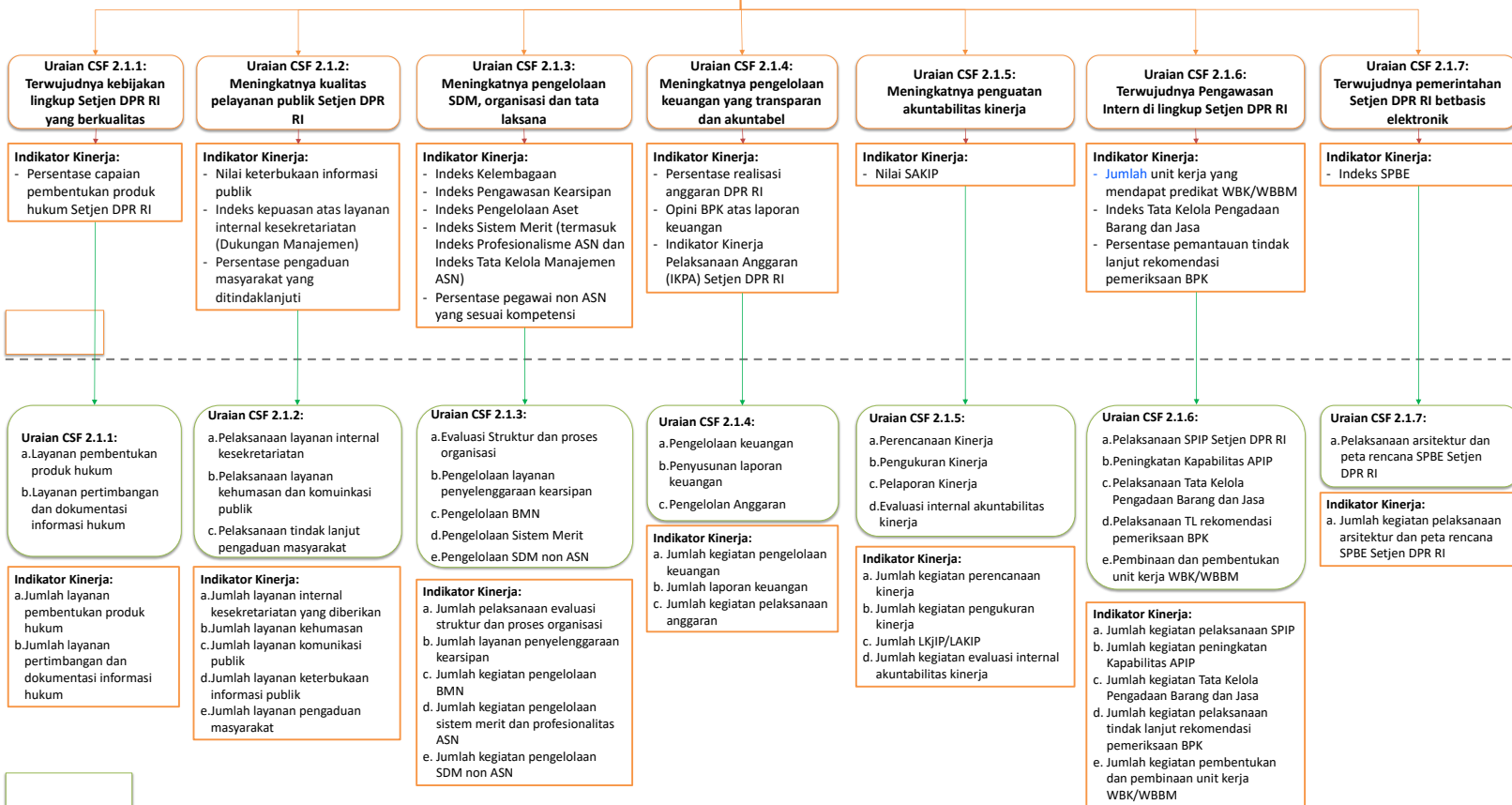
Indikator Kinerja:
• Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
• Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

CSF 2:
"Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel"

Indikator Kinerja:
Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.1:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB General Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:
• Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI
• Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Setjen DPR RI
• Hasil pengawasan kearsipan lembaga Setjen DPR RI
• **Peringkat Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Setjen DPR RI**
• Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI
• Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI
• **Persentase unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM**



MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (7)

Uraian CSF 2.1:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB General Setjen DPR RI”

Indikator Kinerja:

- Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI
- Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Setjen DPR RI
- Hasil pengawasan kearsipan lembaga Setjen DPR RI
- Hasil peringkat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Setjen DPR RI
- Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI
- Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI
- Persentase unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SP.2 Meningkatnya kontribusi Deputi Bidang Persidangan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI	IKP 2.1 Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	Deputi Bidang Persidangan	83 (A)	85 (A)
		IKP 2.2 Peringkat Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik		5 besar	5 besar
2	SP 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	IKP 2.1 Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI	Deputi Bidang Administrasi	79	80
		IKP 2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI		7,71	7,71

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (8)

Uraian CSF 2.1:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB General Setjen DPR RI”

Indikator Kinerja:

- Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI
- Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Setjen DPR RI
- Hasil pengawasan kearsipan lembaga Setjen DPR RI
- Hasil peringkat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Setjen DPR RI
- Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI
- Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI
- Persentase unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
3	SP 1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	IKP 1.1 Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI	Inspektorat Utama	3,1	3,3
4	SP 2. Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Setjen DPR RI	IKP 2.1 Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI		3,1	3,2
5	SP 3. Meningkatnya penerapan zona integritas di lingkup Setjen DPR RI	IKP 3.1 Persentase unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM		7/21 (33,33% atau 1/3)	7/21 (33,33% atau 1/3)

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (9)

Uraian CSF 2.1:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB General Setjen DPR RI”

Indikator Kinerja:

- Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI
- Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Setjen DPR RI
- Hasil pengawasan kearsipan lembaga Setjen DPR RI
- Hasil peringkat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Setjen DPR RI
- Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI
- Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI
- Persentase unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
6	SP 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	IKP 3.1 Nilai SAKIP Deputi Bidang Persidangan	Deputi Bidang Persidangan	70 (BB)	71 (BB)
7	SP 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	IKP 3.1 Nilai SAKIP Deputi Bidang Administrasi	Deputi Bidang Administrasi	70 (BB)	71 (BB)
8	SP 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	IKP 2.1 Nilai Sakip Badan Keahlian	Badan Keahlian	70 (BB)	71 (BB)
9	SP 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang berkualitas	IKP 4.1 Nilai SAKIP Inspektorat Utama Setjen DPR RI	Inspektorat Utama	70 (BB)	71 (BB)

**Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Indikator Kinerja:

- Persentase intansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
- Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

**CSF 2:
"Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen
DPR RI yang berkualitas, transparan dan
akuntabel"**

Indikator Kinerja:

Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.2:

Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:

Nilai RB Tematik (target RB x nilai maksimal RB Tematik) Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.2.1:

Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah

Indikator Kinerja:

Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah

Uraian CSF 2.2.1:

- Satu Data Setjen DPR RI
- Pelayanan publik secara digital

Indikator Kinerja:

- Persentase integrasi Satu Data Setjen DPR RI
- Jumlah Pelayanan publik secara digital

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (10)

Uraian CSF 2.2:

“Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI”

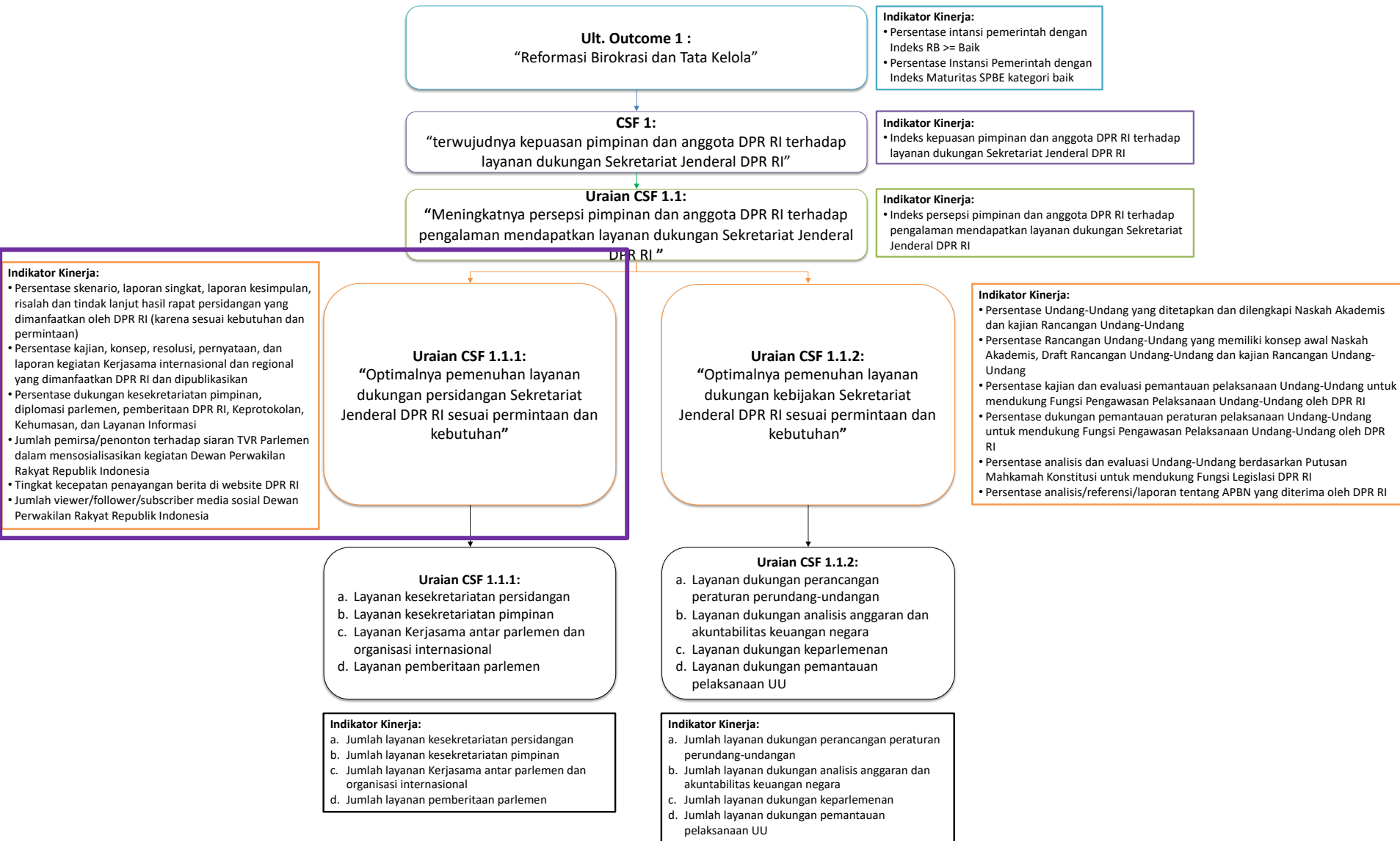
Indikator Kinerja:

Nilai RB Tematik (target RB x nilai maksimal RB Tematik) Setjen DPR RI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	Terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI berbasis elektronik	IKK 1.1 Indeks SPBE Setjen DPR RI	Pusat Teknologi Informasi	2,98 (Baik)	3 (Baik)

Catatan:

- Uraian CSF 2.2 yang merupakan kinerja strategis sub sektor diampu oleh struktur dibawah Sekjen DPR RI langsung yang merupakan unit kerja eselon II (Pusat Teknologi Informasi)
- Sehingga, Pusat Teknologi Informasi akan menjadi oenanggung jawab level kinerja strategis sub sektor maupun level kinerja taktikal



MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (11)

Uraian CSF 1.1.1:
 “Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase skenario, laporan singkat, laporan kesimpulan, risalah dan tindak lanjut hasil rapat persidangan yang dimanfaatkan oleh DPR RI (karena sesuai kebutuhan dan permintaan)
- Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan kegiatan Kerjasama internasional dan regional yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan
- Persentase dukungan kesekretariatan pimpinan, diplomasi parlemen, pemberitaan DPR RI, Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi
- Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
- Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK.1 Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan dan risalah Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan	IKP 1.1 Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Persidangan I	100%	100%
		IKP 1.2 Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Persidangan I	100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (12)

Uraian CSF 1.1.1:

“Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase skenario, laporan singkat, laporan kesimpulan, risalah dan tindak lanjut hasil rapat persidangan yang diterima oleh DPR RI (karena sesuai kebutuhan dan permintaan)
- Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan kegiatan Kerjasama internasional dan regional yang diterima DPR RI dan dipublikasikan
- Persentase dukungan kesekretariatan pimpinan, diplomasi parlemen, pemberitaan DPR RI, Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi
- Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
- Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
2	SK.1 Optimalnya pemenuhan layanan dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan	IKK 1.1 Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Persidangan II	100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (13)

Uraian CSF 1.1.1:
“Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase skenario, laporan singkat, laporan kesimpulan, risalah dan tindak lanjut hasil rapat persidangan yang diterima oleh DPR RI (karena sesuai kebutuhan dan permintaan)
- Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan kegiatan Kerjasama internasional dan regional yang diterima DPR RI dan dipublikasikan
- Persentase dukungan kesekretariatan pimpinan, diplomasi parlemen, pemberitaan DPR RI, Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi
- Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
- Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
3	SK.1 Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	IKK 1.1 Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	Biro Kesekretariatan Pimpinan	100%	100%
		IKK 1.2 Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI		100%	100%
		IKK 1.3 Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI		100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (14)

Uraian CSF 1.1.1:
 “Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase skenario, laporan singkat, laporan kesimpulan, risalah dan tindak lanjut hasil rapat persidangan yang diterima oleh DPR RI (karena sesuai kebutuhan dan permintaan)
- Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan kegiatan Kerjasama internasional dan regional yang diterima DPR RI dan dipublikasikan
- Persentase dukungan kesekretariatan pimpinan, diplomasi parlemen, pemberitaan DPR RI, Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi
- Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
- Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
4	SK.1 Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	IKK 1.1 Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, Talking Points dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional Maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	100%	100%
		IKK 1.2 Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan		100%	100%
		IKK 1.3 Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan		100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (15)

Uraian CSF 1.1.1:
 “Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase skenario, laporan singkat, laporan kesimpulan, risalah dan tindak lanjut hasil rapat persidangan yang diterima oleh DPR RI (karena sesuai kebutuhan dan permintaan)
- Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan kegiatan Kerjasama internasional dan regional yang diterima DPR RI dan dipublikasikan
- Persentase dukungan kesekretariatan pimpinan, diplomasi parlemen, pemberitaan DPR RI, Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi
- Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
- Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
5	SK.1 Meningkatnya kualitas dukungan pemberitaan DPR RI	IKK 1.1 Jumlah Penonton/ Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI	Biro Pemberitaan Parlemen	400 juta	?
		IKK 1.2 Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website DPR RI		12 Jam	?
		IKK 1.3 Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI		250.000	?
6	SK. 2 Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI	IKK 2.1 Jumlah <i>Viewers</i> Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama <i>Online</i>	Biro Pemberitaan Parlemen	75 Juta	?

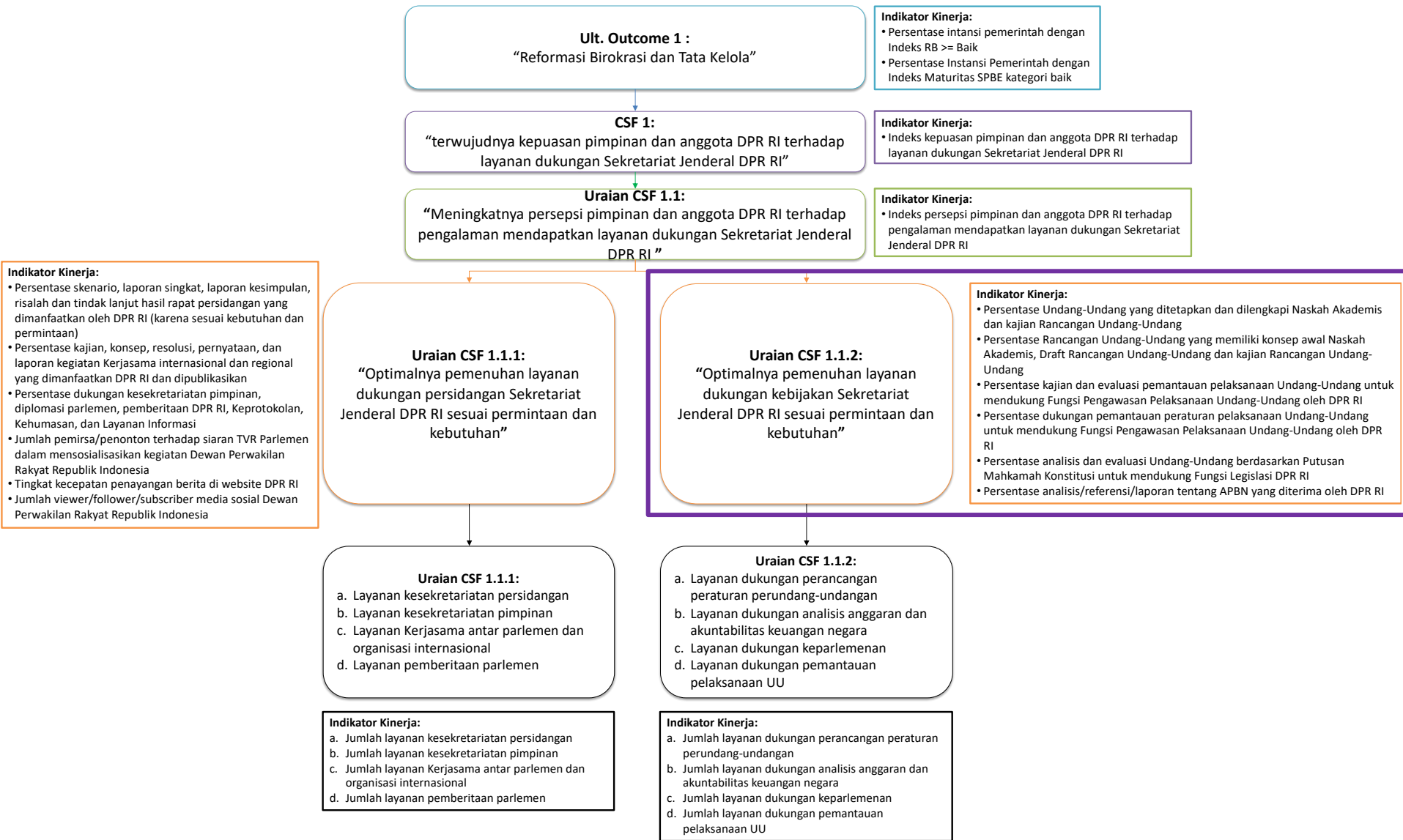
MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (16)

Uraian CSF 1.1.1:
 “Optimalnya pemenuhan layanan dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase skenario, laporan singkat, laporan kesimpulan, risalah dan tindak lanjut hasil rapat persidangan yang diterima oleh DPR RI (karena sesuai kebutuhan dan permintaan)
- Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan kegiatan Kerjasama internasional dan regional yang diterima DPR RI dan dipublikasikan
- Persentase dukungan kesekretariatan pimpinan, diplomasi parlemen, pemberitaan DPR RI, Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi
- Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
- Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
7	SK.1 Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi Setjen DPR RI	IKK 1.1 Persentase dukungan keprotokolan Setjen DPR RI	Biro Protokol dan Humas	100%	?
		IKK 1.2 Persentase dukungan pengelolaan museum Setjen DPR RI		100%	?
		IKK 1.3 Persentase dukungan pengelolaan perpustakaan Setjen DPR RI		100%	?



MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (17)

Uraian CSF 1.1.2:

“Optimalnya pemenuhan layanan dukungan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI
- Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang diterima oleh DPR RI



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK.1 Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	IKK 1.1 Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM	100%	100%
		IKK 1.2 Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia		100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (18)

Uraian CSF 1.1.2:
 “Optimalnya pemenuhan layanan dukungan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI
- Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang diterima oleh DPR RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
2	SK.1 Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	IKK 1.1 Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
		IKK 1.2 Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat		100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (19)

Uraian CSF 1.1.2:

“Optimalnya pemenuhan layanan dukungan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI
- Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang diterima oleh DPR RI



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
3	SK 1. Meningkatnya Kualitas Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI	IKK 1.1 Persentase Analisis/ Referensi/ Laporan tentang APBN yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	100%	100%
		IKK 1.2 Persentase Ringkasan/ Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang Dimanfaatkan oleh DPR RI		100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (20)

Uraian CSF 1.1.2:

“Optimalnya pemenuhan layanan dukungan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI
- Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang diterima oleh DPR RI



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
4	SK.1 Terlaksananya analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan peran diplomasi serta kebijakan pimpinan	IKK 1.1 Persentase hasil analisis legislatif, isu sepekan, info singkat, Parliamentary Review, jurnal, buku, dan Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	Pusat Analisis Keparlemenan	100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (21)

Uraian CSF 1.1.2:

“Optimalnya pemenuhan layanan dukungan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai permintaan dan kebutuhan”

Indikator Kinerja:

- Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
- Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
- Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI
- Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang diterima oleh DPR RI



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
4	SK 1. Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	IKK 1.1 Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang	100%	100%
		IKK 1.2 Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		100%	100%
		IKK 1.3 Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		100%	100%

**Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

- Indikator Kinerja:**
- Persentase intansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
 - Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

**CSF 2:
"Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel"**

- Indikator Kinerja:**
- Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

**Uraian CSF 2.1:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB General Setjen DPR RI**

- Indikator Kinerja:**
- Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Setjen DPR RI
 - Hasil pengawasan kearsipan lembaga Setjen DPR RI
 - **Peringkat Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Setjen DPR RI**
 - Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI
 - Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI
 - **Persentase** unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

**Uraian CSF 2.2:
Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI**

- Indikator Kinerja:**
- Nilai RB Tematik (target RB x nilai maksimal RB Tematik) Setjen DPR RI

**Uraian CSF 2.1.1:
Terwujudnya kebijakan lingkup Setjen DPR RI yang berkualitas**

- Indikator Kinerja:**
- Persentase capaian pembentukan produk hukum Setjen DPR RI



**Uraian CSF 2.1.2:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Setjen DPR RI**

- Indikator Kinerja:**
- Nilai keterbukaan informasi publik
 - Indeks kepuasan atas layanan internal kesekretariatan (Dukungan Manajemen)
 - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

**Uraian CSF 2.1.3:
Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tata laksana**

- Indikator Kinerja:**
- Indeks Kelembagaan
 - Indeks Pengawasan Kearsipan
 - Indeks Pengelolaan Aset
 - Indeks Sistem Merit (termasuk Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN)
 - Persentase pegawai non ASN yang sesuai kompetensi

**Uraian CSF 2.1.4:
Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel**

- Indikator Kinerja:**
- Persentase realisasi anggaran DPR RI
 - Opini BPK atas laporan keuangan
 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI

**Uraian CSF 2.1.5:
Meningkatnya pengujian akuntabilitas kinerja**

- Indikator Kinerja:**
- Nilai SAKIP

**Uraian CSF 2.1.6:
Terwujudnya Pengawasan Intern di lingkup Setjen DPR RI**

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
 - Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
 - Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK

**Uraian CSF 2.1.7:
Terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI berbasis elektronik**

- Indikator Kinerja:**
- Indeks SPBE

**Uraian CSF 2.2.1:
Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah**

- Indikator Kinerja:**
- Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah

**Uraian CSF 2.1.1:
a. Layanan pembentukan produk hukum**

- b. Layanan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah layanan pembentukan produk hukum
 - Jumlah layanan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum

**Uraian CSF 2.1.2:
a. Pelaksanaan layanan internal kesekretariatan**

- b. Pelaksanaan layanan kehumasan dan komunikasi publik
- c. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah layanan internal kesekretariatan yang diberikan
 - Jumlah layanan kehumasan
 - Jumlah layanan komunikasi publik
 - Jumlah layanan keterbukaan informasi publik
 - Jumlah layanan pengaduan masyarakat

**Uraian CSF 2.1.3:
a. Evaluasi Struktur dan proses organisasi**

- b. Pengelolaan layanan penyelenggaraan kearsipan
- c. Pengelolaan BMN
- d. Pengelolaan Sistem Merit
- e. Pengelolaan SDM non ASN

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah pelaksanaan evaluasi struktur dan proses organisasi
 - Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan
 - Jumlah kegiatan pengelolaan BMN
 - Jumlah kegiatan pengelolaan sistem merit dan profesionalitas ASN
 - Jumlah kegiatan pengelolaan SDM non ASN

**Uraian CSF 2.1.4:
a. Pengelolaan keuangan**

- b. Penyusunan laporan keuangan
- c. Pengelolaan Anggaran

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan
 - Jumlah laporan keuangan
 - Jumlah kegiatan pelaksanaan anggaran

**Uraian CSF 2.1.5:
a. Perencanaan Kinerja**

- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah kegiatan perencanaan kinerja
 - Jumlah kegiatan pengukuran kinerja
 - Jumlah LKJIP/LAKIP
 - Jumlah kegiatan evaluasi internal akuntabilitas kinerja

**Uraian CSF 2.1.6:
a. Pelaksanaan SPIP Setjen DPR RI**

- b. Peningkatan Kapabilitas APIP
- c. Pelaksanaan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Pelaksanaan TL rekomendasi pemeriksaan BPK
- e. Pembinaan dan pembentukan unit kerja WBK/WBBM

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah kegiatan pelaksanaan SPIP
 - Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP
 - Jumlah kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
 - Jumlah kegiatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK
 - Jumlah kegiatan pembentukan dan pembinaan unit kerja WBK/WBBM

**Uraian CSF 2.1.7:
a. Pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE Setjen DPR RI**

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah kegiatan pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE Setjen DPR RI

**Uraian CSF 2.2.1:
a. Satu Data Setjen DPR RI**

- b. Pelayanan publik secara digital

- Indikator Kinerja:**
- Persentase Integrasi Satu Data Setjen DPR RI
 - Jumlah Pelayanan publik secara digital

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (22)

Uraian CSF 2.1.1:
“Terwujudnya kebijakan lingkup Setjen DPR RI yang berkualitas”

Indikator Kinerja:
Persentase capaian pembentukan produk hukum Setjen DPR RI



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK. 1 Meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	IKK 1.1 Presentase capaian pembentukan produk hukum (output)	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	100%	100%
		IKK 1.2 Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro hukum dan Pengaduan Masyarakat		3,2	3,3
		IKK 1.3 Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat		93%	94%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (23)

Uraian CSF 2.1.2:
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik Setjen DPR RI”

Indikator Kinerja:

- Nilai keterbukaan informasi publik
- Indeks kepuasan atas layanan internal kesekretariatan (Dukungan Manajemen)
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Biro hukum dan Pengaduan Masyarakat	IKK 1.2 Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro hukum dan Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	3,2	3,3
2	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Biro SDM Aparatur	IKK 1.3 Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro SDM Aparatur	Biro SDM Aparatur	3,16	3,17
3	SK.2 Meningkatkan kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi Dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	IKK 2.2 Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	?	?
4	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK 1.2 Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro Keuangan	Biro Keuangan	3,35	3,42
5	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	IKK 1.1 Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,30	3,33
6	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Umum	IKK 1.2 Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro Umum	Biro Umum	3,28	3,29

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (24)

Uraian CSF 2.1.2:
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik Setjen DPR RI”

Indikator Kinerja:

- Nilai keterbukaan informasi publik
- Indeks kepuasan atas layanan internal kesekretariatan (Dukungan Manajemen)
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
7	SK.2 Meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi	IKK 2.1 Indeks Kepuasan pengguna layanan Pusat Teknologi Informasi	Pusat Teknologi Informasi	3,2	?
8	SK 1 Meningkatkan kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	IKK 1.5 Indeks Kepuasan pengguna layanan Kesekretariatan Pimpinan	Biro Kesekretariatan Pimpinan	?	?
9	SK 1 Meningkatkan kualitas dukungan keprotokolan, kehumasan dan layanan informasi Setjen DPR RI	IKK 1.1 Persentase dukungan keprotokolan dan Humas Setjen DPR RI	Biro Protokol dan Humas	100%	100%
		IKK 1.2 Persentase dukungan layanan perpustakaan Setjen DPR RI	Biro Protokol dan Humas	100%	100%
		IKK 2.1 Nilai keterbukaan informasi publik	Biro Protokol dan Humas	98,14 (informatif)	98,15 (informatif)
10	SK 1. Meningkatkan kualitas dukungan Biro Sumber Hukum dan Pengaduan Masyarakat	IKK 1.4 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (25)

**Uraian CSF 2.1.3:
“Meningkatnya
pengelolaan SDM,
organisasi dan tata
laksana”**

Indikator Kinerja:

- Indeks Kelembagaan
- Indeks Pengawasan Kearsipan
- Indeks Pengelolaan Aset
- Indeks Sistem Merit (termasuk Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN)
- Persentase pegawai non ASN yang sesuai kompetensi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK. 2. Meningkatkan kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan RB Setjen DPR RI	IKK 2.1 Indeks Kelembagaan	Biro Perencanaan dan Organisasi	77,6	77,77
2	SK 1 Meningkatkan kualitas dukungan keprotokolan, kehumasan dan layanan informasi Setjen DPR RI	IKK 1.4 Hasil Pengawasan Kearsipan	Biro Protokol dan Humas	83 (A)	85 (A)
3	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK 1.1 Indeks Pengelolaan Aset	Biro Keuangan	3,60	3,65
4	SK 1. Meningkatkan kualitas dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	IKK 1.1 Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang Sesuai Kompetensi	Biro SDM Aparatur	95%	96%
		IKK 1.2 Indeks Sistem Merit	Biro SDM Aparatur	350	355

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (26)

**Uraian CSF 2.1.3:
“Meningkatnya
pengelolaan SDM,
organisasi dan tata
laksana”**

Indikator Kinerja:

- Indeks Kelembagaan
- Indeks Pengawasan Kearsipan
- Indeks Pengelolaan Aset
- Indeks Sistem Merit (termasuk Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN)
- Persentase pegawai non ASN yang sesuai kompetensi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
5	SK 1. Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM legislatif secara efektif dan efisien	IKK 1.1 Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam Satu Tahun	Pusat Pengembangan Kompetensi SDM legislatif	60%	?
		IKK 1.2 Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan	Pusat Pengembangan Kompetensi SDM legislatif	90%	?

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (27)

Uraian CSF 2.1.4:
“Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”

Indikator Kinerja:

- Persentase realisasi anggaran DPR RI
- Opini BPK atas laporan keuangan
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK 1. Meningkatkan kualitas dukungan persidangan dan risalah	IKP 1.3 Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	Biro Persidangan I	97%	97%
2	SK 1. Meningkatkan kualitas dukungan persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus	IKK 1.2 Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	Biro Persidangan II	95%	96%
3	SK 1 Meningkatkan kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	IKK 1.4 Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	Biro Kesekretariatan Pimpinan	99%	99%
4	SK 1 Meningkatkan kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	IKK 1.4 Persentase Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	96%	98%
5	SK 1 Meningkatkan kualitas dukungan pemberitaan DPR RI	IKK 1.4 Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	Biro Pemberitaan Parlemen	95%	95,5%
6	SK 1 Meningkatkan kualitas dukungan keprotokolan, kehumasan dan layanan informasi Setjen DPR RI	IKK 1.5 Persentase Realisasi Anggaran Biro Protokol dan Humas	Biro Protokol dan Humas	95%	96%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (28)

Uraian CSF 2.1.4:
“Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”

Indikator Kinerja:

- Persentase realisasi anggaran DPR RI
- Opini BPK atas laporan keuangan
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
7	SK 1. Meningkatkan kualitas dukungan Biro Sumber Hukum dan Pengaduan Masyarakat	IKP 1.3 Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	93%	94%
8	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Biro SDM Aparatur	IKK 1.4 Persentase realisasi anggaran Biro SDM Aparatur	Biro SDM Aparatur	95%	96%
9	SK. 2. Meningkatkan kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan RB Setjen DPR RI	IKK 2.4 Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	99%	99%
10	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Biro Keuangan	Biro Keuangan	95%	95% ?
11	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	IKK 1.2 Persentase Realisasi Anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	99%	99% ?
12	SK.1 Meningkatkan kualitas dukungan Umum	IKK 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	Biro Umum	98,8%	98,8% ?

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (29)

Uraian CSF 2.1.4:
“Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”

Indikator Kinerja:

- Persentase realisasi anggaran DPR RI
- Opini BPK atas laporan keuangan
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
13	SK 1 Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM	IKK 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM	95,5%	96% ?
14	SK 1 Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	IKK 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	95,5%	96% ?
15	SK 1. Terlaksananya analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan peran diplomasi serta kebijakan pimpinan	IKK 1.3 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	99%	99% ?
16	SK 1. Terlaksananya analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan peran diplomasi serta kebijakan pimpinan	IKK 1.2 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Analisis Keparlemenan	Pusat Analisis Keparlemenan	95%	97% ?
17	SK 1. Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	IKK 1.4 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang	91%	94% ?

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (30)

Uraian CSF 2.1.4:
“Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”

Indikator Kinerja:

- Persentase realisasi anggaran DPR RI
- Opini BPK atas laporan keuangan
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
18	SK 1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	IKK 1.4 Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat I	Inspektorat I	99%	99%
19	SK 1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	IKK 1.4 Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II	Inspektorat II	99%	99%
20	SK 2. Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	IKK 2.1 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi	Pusat Teknologi Informasi	95%	95%
21	SK 1. Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM legislatif secara efektif dan efisien	IKK 1.4 Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	90,5%	91%
22	SK.1 Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK 1.4 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI	Biro Keuangan	93,85%	91%
		IKK 1.5. Opini BPK atas laporan keuangan	Biro Keuangan	4 (WTP)	4 (WTP)

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (31)

Uraian CSF 2.1.5:
“Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja”

Indikator Kinerja:
- Nilai SAKIP



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK 1. Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI	IKK 1.1 Nilai SAKIP Setjen DPR RI	Biro Perencanaan dan Organisasi	70 (BB)	71 (BB)
2	SK 2. Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan RB Setjen DPR RI	IKK 2.4 Persentase unit kerja yang telah Menyusun risk register dan rencana tindak pengendaliannya	Biro Perencanaan dan Organisasi	100%	100%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (32)

**Uraian CSF 2.1.6:
“Terwujudnya Pengawasan Intern di
lingkup Setjen DPR RI”**

Indikator Kinerja:

- Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK 1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	IKK 1.1 Jumlah unit kerja di lingkup kerja Inspektorat I yang mendapat predikat WBK/WBBM	Inspektorat I	3 unit	?
		IKK 1.2 Persentase Pejabat Tinggi Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat I yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Inspektorat I	100%	100%
		IKK 1.3 Persentase Aparatur Sipil Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat I yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Inspektorat I	100%	100%
2	SK 2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut auditor di lingkup tugas Inspektorat I	IKK 2.1 Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I	Inspektorat I	86%	87%
		IKK 2.2 Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I	Inspektorat I	55%	56%

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (33)

Uraian CSF 2.1.6:
“Terwujudnya Pengawasan Intern di lingkup Setjen DPR RI”

Indikator Kinerja:

- Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK 1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	IKK 1.1 Jumlah unit kerja di lingkup kerja Inspektorat II yang mendapat predikat WBK/WBBM	Inspektorat II	4 unit	?
		IKK 1.2 Persentase Pejabat Tinggi Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat II yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Inspektorat II	100%	100%
		IKK 1.3 Persentase Aparatur Sipil Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat II yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Inspektorat II	100%	100%
2	Sk 2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut auditor di lingkup tugas Inspektorat II	IKK 2.1 Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	Inspektorat II	91%	94%
		IKK 2.2 Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	Inspektorat II	59%	76%
3	SK 1. Meningkatnya kualitas dukungan Umum	IKK 1.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR RI (Sumber target: SE Kepala LKPP no 4 tahun 2021)	Biro Umum	50% ≤ x < 70% (Cukup)	70% (Baik)

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (34)

Uraian CSF 2.1.7:

“Terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI betbasis elektronik”

Indikator Kinerja:

- Indeks SPBE



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK 1. Terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI betbasis elektronik	IKK 1.1 Indeks SPBE Setjen DPR RI	Pusat Teknologi Informasi	2,98 (Baik)	

**Outcome 1 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Indikator Kinerja:

- Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB >= Baik
- Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik

**CSF 2:
"Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen
DPR RI yang berkualitas, transparan dan
akuntabel"**

Indikator Kinerja:

Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.2:

Terwujudnya hasil pelaksanaan RB Tematik Setjen DPR RI

Indikator Kinerja:

Nilai RB Tematik (target RB x nilai maksimal RB Tematik) Setjen DPR RI

Uraian CSF 2.2.1:

Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah

Indikator Kinerja:

Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah

Uraian CSF 2.2.1:

- a. Satu Data Setjen DPR RI
- b. Pelayanan publik secara digital

Indikator Kinerja:

- a. Persentase integrasi Satu Data Setjen DPR RI
- b. Jumlah Pelayanan publik secara digital

MENTERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN (36)

Uraian CSF 2.2.1:
"Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah"

Indikator Kinerja:

- Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Level Kinerja/ Pj Kinerja	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SK 4. Terwujudnya pelaksanaan RB tema digitalisasi administrasi pemerintah	IKK 4.1 Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah	Pusat Teknologi Informasi	?	?



HASIL PENERJEMAHAN POHON KINERJA SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

STANDAR KINERJA SEKRETARIS JENDERAL

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET 2023	TARGET 2024
SS.1	Terwujudnya kepuasan pimpinan dan anggota DPR RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	IKSS 1.1	Indeks kepuasan pimpinan dan Anggota DPR RI atas Layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,32	3,33
SS.2	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Setjen DPR RI yang berkualitas, transparan dan akuntabel	IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI	79 (BB)	80 (A)



HASIL PENERJEMAHAN POHON KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG ADMINISTRASI

STANDAR KINERJA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI (1)

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKP	Indikator Kinerja Program (IKP)	TARGET 2023	TARGET 2024
SP. 1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	IKP 1.1	<p>Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Administrasi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ini bisa dihitung dengan menambahkan 1 pertanyaan “Secara umum, bagaimana pengalaman anda mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Administrasi”; atau • Mengukur nilai (score) rata-rata dari 7 (tujuh) parameter terkait layanan Administrasi → sama dengan kondisi saat ini, namun berbeda bahasa indikator 	3,34	3,35
SP. 2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	IKP 2.1	Nilai RB General (target RB x nilai maksimal RB General) Setjen DPR RI	79	80
		IKP 2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI	7,71	7,71
SP. 3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	IKP 3.1	Nilai SAKIP Deputi Bidang Administrasi	70 (BB)	71 (BB)

STANDAR KINERJA BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	IK 1.1	Presentase capaian pembentukan produk hukum (output)	100%	100%
		IKK 124	Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro hukum dan Pengaduan Masyarakat	3,2	3,3
		IKK 1.3	Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	93%	94%
		IKK 1.4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%

STANDAR KINERJA BIRO SDM APARATUR

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	IKK 1.1	Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang Sesuai Kompetensi	95%	96%
		IKK 1.2	Indeks Sistem Merit	350	355
		IKK 1.3	Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro SDM Aparatur	3,16	3,17
		IKK 1.4	Persentase realisasi anggaran Biro SDM Aparatur	95%	96%

STANDAR KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI	IKK 1.1	Nilai SAKIP Setjen DPR RI	70 (BB)	71 (BB)
SK 2	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan RB Setjen DPR RI	IKK 2.1	Indeks Kelembagaan	77,6	77,7
		IKK 2.2	Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	?	?
		IKK 2.3	Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	99%	99%
		IKK 2.4	Persentase unit kerja yang telah Menyusun risk register dan rencana tindak pengendaliannya	100%	100%

STANDAR KINERJA BIRO KEUANGAN

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan	IKK 1.1	Indeks Pengelolaan Aset	3,60	3,65
		IKK 1.2	Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro Keuangan	3,35	3,42
		IKK 1.3	Persentase Realisasi Anggaran Biro Keuangan	95%	95%
		IKK 1.4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DPR RI	93,85%	94%
		IKK 1.5	Opini BPK atas laporan keuangan	4 (WTP)	4 (WTP)

STANDAR KINERJA BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	IKK 1.1	Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,30	3,33
		IKK 1.2	Persentase Realisasi Anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	99%	99%

STANDAR KINERJA BIRO UMUM

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	IKK 1.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR RI (Sumber target: SE Kepala LKPP no 4 tahun 2021)	50% $50\% \leq x < 70\%$ (Cukup)	70% (Baik)
		IKK 1.2	Indeks Kepuasan pengguna layanan Biro Umum	3,28	3,29
		IKK 1.3	Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	98,8%	98,8%



HASIL PENERJEMAHAN POHON KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG PERSIDANGAN

STANDAR KINERJA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN (1)

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKP	Indikator Kinerja Program (IKP)	TARGET 2023	TARGET 2024
SP. 1	Meningkatnya persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Deputi Persidangan	IKP 1.1	<p>Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Persidangan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ini bisa dihitung dengan menambahkan 1 pertanyaan “Secara umum, bagaimana pengalaman anda mendapatkan layanan dukungan Deputi Bidang Persidangan”; atau • Mengukur nilai (score) rata-rata dari 7 (tujuh) parameter terkait layanan persidangan → sama dengan kondisi saat ini, namun berbeda bahasa indikator 	3,32	3,33
SP. 2	Meningkatnya kontribusi Deputi Bidang Persidangan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI	IKP 2.1	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	83 (A)	85 (A)
		IKP 2.2	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	98,14 (informatif)	98,15 (informatif)
SP. 3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	IKP 3.1	Nilai SAKIP Deputi Bidang Persidangan	70 (BB)	71 (BB)

STANDAR KINERJA BIRO PERSIDANGAN I

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	IKK 1.1	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		IKK 1.2	Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		IKK 1.3	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	97%	97%

STANDAR KINERJA BIRO PERSIDANGAN II

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus	IKK 1.1	Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		IKK 1.2	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	95%	96%

STANDAR KINERJA BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	IKK 1.1	Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	100%	100%
		IKK 1.2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%	100%
		IKK 1.3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%	100%
		IKK 1.4	Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	99%	99%
		IKK 1.5	Indeks Kepuasan pengguna layanan Kesekretariatan Pimpinan	?	?

STANDAR KINERJA BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	IKK 1.1	Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, Talking Points dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional Maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%	100%
		IKK 1.2	Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%	100%
		IKK 1.3	Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%	100%
		IKK 1.4	Persentase Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	96%	98%

STANDAR KINERJA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan pemberitaan DPR RI	IKK 1.1	Jumlah Penonton/ Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI	400 juta	450 juta
		IKK 1.2	Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website DPR RI	12 Jam	10 jam
		IKK 1.3	Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	250.000	300.000
		IKK 1.4	Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	95%	95,5%
SK 2	Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI	IKK 2.1	Jumlah <i>Viewers</i> Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama <i>Online</i>	75 Juta	100 Juta

STANDAR KINERJA BIRO PROTOKOL DAN HUMAS

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi Setjen DPR RI	IK 1.1	Persentase dukungan keprotokolan dan Humas Setjen DPR RI	100%	100%
		IK 1.2	Persentase dukungan layanan perpustakaan Setjen DPR RI	100%	100%
		IK 1.3	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	98,14 (informatif)	98,15
		IK 1.4	Hasil Pengawasan Kearsipan	83 (A)	85 (A)
		IK 1.5	Persentase Realisasi Anggaran Biro Protokol dan Humas	95%	96%



HASIL PENERJEMAHAN POHON KINERJA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

STANDAR KINERJA BADAN KEAHLIAN

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKP	Indikator Kinerja Program (IKP)	TARGET 2023	TARGET 2024
SP 1	SP.1 Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	IKP 1.1	<p>Indeks persepsi pimpinan dan anggota DPR RI terhadap pengalaman mendapatkan layanan dukungan Badan Keahlian</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indeks ini bisa dihitung dengan menambahkan 1 pertanyaan “Secara umum, bagaimana pengalaman anda mendapatkan layanan dukungan Badan Keahlian”; atau• Mengukur nilai (score) rata-rata dari 7 (tujuh) parameter terkait layanan Badan Keahlian → sama dengan kondisi saat ini, namun berbeda bahasa indikator	3,30	3,31
SP 2	SP.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	IKP 2.1	Nilai Sakip Badan Keahlian	70 (BB)	71 (BB)

STANDAR KINERJA PUSAT PERANCANGAN UU BIDANG POLHUKHAM

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	IKK 1.1	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%
		IKK 1.2	Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%
		IKK 2.1	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	95,5%	96%

STANDAR KINERJA PUSAT PERANCANGAN UU BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	IKK 1.1	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
		IKK 1.2	Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
		IKK 1.3	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	95,5%	96%

STANDAR KINERJA PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya Kualitas Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI	IKK 1.1	Persentase Analisis/ Referensi/ Laporan tentang APBN yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		IKK 1.2	Persentase Ringkasan/ Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang Dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%
		IKK 1.3	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	99%	99%

STANDAR KINERJA PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Terlaksananya analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan peran diplomasi serta kebijakan pimpinan	IK 1.1	Persentase hasil analisis legislatif, isu sepekan, info singkat, Parliamentary Review, jurnal, buku, dan Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%
		IK 2.1	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Analisis Keparlemenan	95%	97%

STANDAR KINERJA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	IKK 1.1	Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		IKK 1.2	Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		IKK 1.3	Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		IKK 2.1	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang	91%	94%



HASIL PENERJEMAHAN POHON KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

STANDAR KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKP	Indikator Kinerja Program (IKP)	TARGET 2023	TARGET 2024
SP 1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	IKP 1.1	Nilai Maturitas SPIP Setjen DPR RI	3,1	3,3
SP 2.	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Setjen DPR RI	IKP 2.1	Nilai Kapabilitas APIP Setjen DPR RI	3,1	3,2
SP 3	Meningkatnya penerapan zona integritas di lingkup Setjen DPR RI	IKP 3.1	Persentase unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	7/21 (33,33% atau 1/3)	7/21 (33,33% atau 1/3)
SP 4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang berkualitas	IKP 4.1	Nilai SAKIP Inspektorat Utama Setjen DPR RI	70 (BB)	71 (BB)

STANDAR KINERJA INSPEKTORAT I

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	IKK 1.1	Jumlah unit kerja di lingkup kerja Inspektorat I yang mendapat predikat WBK/WBBM	3 unit	?
		IKK 1.2	Persentase Pejabat Tinggi Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat I yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%
		IKK 1.3	Persentase Aparatur Sipil Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat I yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%
		IKK 3.1	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat I	99%	99%
SK 2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan di lingkup tugas Inspektorat I	IKK 2.1	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I	86%	87%
		IKK 2.2	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I	55%	56%

STANDAR KINERJA INSPEKTORAT II

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	IKK 1.1	Jumlah unit kerja di lingkup kerja Inspektorat II yang mendapat predikat WBK/WBBM	4	?
		IKK 1.2	Persentase Pejabat Tinggi Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat II yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%
		IKK 1.3	Persentase Aparatur Sipil Negara Setjen DPR RI di lingkup kerja Inspektorat II yang telah memenuhi kewajiban terkait LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%
		IKK 1.4	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II	99%	99%
SK 2	Sk 2. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan di lingkup tugas Inspektorat II	IKK 2.1	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	93%	94%
		IKK 2.2	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	75%	76%



HASIL PENERJEMAHAN POHON KINERJA PUSAT DIBAWAH SEKJEN DPR RI

STANDAR KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI berbasis elektronik	IKK 1.1	Indeks SPBE Setjen DPR RI	2,98 (Baik)	3 (Baik)
		IKK 1.2	Persentase pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE terkait digitalisasi administrasi pemerintah	?	?
SK 2	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	IKK 2.1	Indeks Kepuasan pengguna layanan Pusat Teknologi Informasi	3,2	3,22
		IKK 2.2	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi	95%	95%

STANDAR KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM LEGISLATIF

Hasil analisis berdasarkan pohon kinerja (Permen PANRB 89/2021)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET 2023	TARGET 2024
SK 1	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	IKK 1.1	Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam Satu Tahun	60%	62,5%
		IKK 1.2	Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan	90%	92,5
		IKK 1.3	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	90,5%	91%